

EVALUASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA PROGRAM PRAKTISI PENGAJAR

EVALUATION OF THE INDEPENDENT CAMPUS POLICY ON TEACHING PRACTITIONER PROGRAM

Abdul Rahman^{1*}, Winda Dwi Astuti Zebua², Evi Satispi³, Tiara Nurul Hidayah⁴, Zahriatul Aini⁵

^{1,3,4}Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten

²Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten

⁵Prodi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

*Koresponden email: abdul.rahman@umj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pengangguran di Indonesia dan masih sulitnya dunia usaha/dunia industri mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap bekerja, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara evaluatif bagaimana kebijakan Kampus Merdeka pada program Praktisi Mengajar Tahun 2022. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sementara itu, analisis penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, dengan basis data utama berasal dari hasil survei terhadap: Mahasiswa, Praktisi, Koordinator Perguruan Tinggi, dan Dosen seluruh Indonesia yang sekaligus menjadi subjek penelitian. Sementara itu, metode analisis data menggunakan pendekatan Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil evaluasi kebijakan Kampus Merdeka pada program Praktisi Mengajar belum sepenuhnya optimal. Meskipun banyak hasil positif yang telah dicapai, antara lain: pelaksanaan program yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, peningkatan pengetahuan dan keahlian mahasiswa, dukungan kepemimpinan bagi praktisi dari institusi/perusahaan, efektifitas onboarding session bagi praktisi, dukungan dan kesiapan yang memadai dari pimpinan perguruan tinggi, dan tingkat kepuasan dosen yang tinggi terhadap platform pemilihan praktisi. Namun terdapat juga beberapa temuan yang mengurangi hasil positif tersebut seperti: kurang puasnya mahasiswa terhadap pelaksanaan program dan praktisi, kurang jelasnya informasi pencairan honor bagi praktisi, kurang selarasnya kurikulum kebijakan Kampus Merdeka dengan kurikulum program studi, dan masih ada praktisi yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional. Hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan berimplikasi pada perbaikan tata kelola dan substansi kebijakan pada program Praktisi Mengajar di gelombang/masa yang akan datang.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan; Kampus Merdeka; kebijakan publik; praktisi pengajar

ABSTRACT

The primary aim of this research is to evaluate the impact of the Independent Campus policy on the Teaching Practitioner program in 2022. This study employs a descriptive approach and utilizes two categories of data: primary and secondary. In the analysis of this study, descriptive statistics play a key role. The primary database is derived from survey responses provided by Students, Practitioners, Higher Education Coordinators, and Lecturers representing various regions of Indonesia. The findings of this study indicate that the evaluation of the Teaching Practitioner program under the Independent Campus policy reveals certain areas that do not fully align with the desired ideal outcomes. Despite several positive aspects, such as program relevance to student needs, increased student knowledge and skills, institutional/company leadership support for practitioners, effective practitioner induction sessions, sufficient support and cooperation from higher education leaders, and a high level of lecturer satisfaction with the practitioner selection process, there are several findings that diminish these positive results. These less favorable findings include low student satisfaction with program delivery and practitioners, inadequate clarity regarding practitioner fee payment details, a misalignment between the Independent Campus Policy Curriculum and the program curriculum, and the presence of practitioners with National Lecturer Identification Numbers.

Keywords: Policy evaluation; Independent Campus; public policy; teaching practitioner

PENDAHULUAN

Pendidikan (terutama di entitas pendidikan tinggi) membutuhkan inovasi untuk menciptakan lulusan pendidikan tinggi yang adaptif (Bennett et al., 2018; Indrawati & Kuncoro, 2021; Kaputa et al., 2022). Dalam konteks kontemporer, di Indonesia transformasi pendidikan tinggi dimanifestasikan dalam kebijakan yang disebut “Kampus Merdeka” (Qorib & Harfiani, 2021; Sa’diyah et al.,

2022; Salamah et al., 2023). Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kebijakan Kampus Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada perguruan tinggi dari birokratisasi, terutama bagi mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai (Directorate General of Higher Education, 2020).

Filosofi kebijakan Kampus Merdeka secara formal tertuang dalam Peraturan Menteri Pendi-

kan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara implisit, kebijakan ini berupaya untuk meningkatkan kesiapan lulusan kampus dan memperkuat kerja sama antara industri dengan entitas perguruan tinggi. Kolaborasi aktif dengan industri atau dunia kerja dalam berbagai skema semakin diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pembelajaran yang berlangsung di kampus (De Wit-de Vries et al., 2019; Malik, 2018; Pedro et al., 2019; Rahman et al., 2021).

Dalam kebijakan Kampus Merdeka sendiri, terdapat berbagai program di dalamnya seperti: Magang dan Studi Mandiri Bersertifikat (Apoko et al., 2022; Susanti et al., 2022), Kampus Mengajar (Suardi & Nur, 2022), Wirausaha Merdeka (Setyobakti et al., 2022; Suranto et al., 2022), Indonesian International Student Mobility Awards (Budiarti et al., 2022; Riniati, 2022), Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Anggraini et al., 2022; Wulan et al., 2023), dan Praktisi Pengajar (Hazin & Rahmawati, 2023; Kustini, 2022). Program-program ini juga dikenal sebagai program unggulan karena diinisiasi dan didanai langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Khusus untuk program terakhir (Praktisi Mengajar/PM), program ini memiliki keunikan. Hal itu karena Program Praktisi Pengajar merupakan satu-satunya program yang mengundang praktisi profesional dari dunia industri untuk datang ke kampus untuk mengajar mahasiswa di kelas.

Program ini sangat berbeda dengan program-program unggulan (Kampus Merdeka) lainnya, dimana mahasiswa belajar di luar kampus (baik ke industri maupun ke luar kampus lainnya). Program PM adalah suatu inisiatif yang mempertemukan mahasiswa Indonesia dengan praktisi berkompetensi melalui mata kuliah kolaboratif yang diajarkan oleh akademisi. Tujuan utama program ini adalah untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lulusan di dunia kerja. Mata kuliah dalam program ini didesain dan dikelola melalui kolaborasi antara dosen dan praktisi, sehingga mahasiswa dapat mengalami pembelajaran yang komprehensif yang menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Program PM memiliki dua konteks problem historis, pertama: 9,1 juta dari 140,15 juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur, kedua: 8 dari 10 perusahaan di Indonesia sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap pakai (Ministry of Education, 2022).

Penelitian tentang kebijakan Kampus Merdeka telah menjadi subjek penelitian yang luas, dan tidak sepenuhnya baru. Namun demikian, hanya ada beberapa penelitian yang secara khusus mem-

bahas program Praktisi Mengajar (PM). Hal ini dikarenakan program PM baru diluncurkan pada tahun 2022. Beberapa literatur sebelumnya yang meneliti program PM terbatas pada fokus pembahasan pada pembelajaran (Kustini, 2022; Sesmiarni & Ismail, 2022), pengembangan literasi (Musyaffi et al., 2022), dan kegiatan sosialisasi PM (Rahman et al., 2022), dan implementasi (Hazin & Rahmawati, 2023).

Menilik pada pelbagai kajian tersebut, sebelumnya tidak pernah ada yang meneliti program PM dalam konteks/kerangka analisis evaluasi kebijakan, disinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Kampus Merdeka, khususnya pada program PM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan catatan kritis dan mendalam terhadap pelaksanaan program PM sepanjang tahun 2022, serta memberikan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan untuk terus menyempurnakan program PM, sehingga program ini memiliki kebermanfaatan yang lebih menyeluruh dan berdampak di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana lebih menggambarkan ciri-ciri orang, peristiwa, atau keadaan tertentu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan terkadang bagaimana (Gravetter & Forzano, 2018; Mohajan, 2018; Pandey & Pandey, 2021). Selain itu, juga dapat digunakan oleh peneliti untuk mempelajari distribusi satu atau beberapa variabel (Möttus et al., 2020; Puspitawati et al., 2023; Siedlecki, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan dan permasalahan yang ada pada masing-masing variabel yang diteliti melalui penggunaan metodologi deskriptif.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup hasil tanggapan dari para responden terkait variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Data sekunder melibatkan berbagai sumber referensi, seperti buku, jurnal, dan data yang diterbitkan oleh instansi terkait, yang digunakan untuk memberikan dukungan dan memperkuat data primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menguraikan data yang telah terkumpul tanpa mencapai kesimpulan yang bersifat umum (Amrhein et al., 2019).

Penelitian ini tergolong penelitian survei, dengan responden penelitian meliputi: Mahasiswa, Praktisi, Koordinator Perguruan Tinggi, dan Dosen dari seluruh Indonesia. Evaluasi dilakukan ber-

dasarkan aspek substansi dari masing-masing responden. Adapun, pengumpulan data dengan metode survei ini bekerja sama dengan Tim Pelaksana Pusat Kampus Mandiri (PPKM), sebagai lembaga *ad hoc* yang melaksanakan program-program Kampus Merdeka. Adapun rincian responden tertera di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Responden Penelitian

No	Kategori Responden	Jumlah
1	Mahasiswa	13.296
2	Praktisi	1.833
3	Koordinator Perguruan Tinggi	220
4	Dosen	1.287
Total		16.636

Dalam rangka mendapatkan pandangan dari para responden mengenai objek penelitian, kuesioner disusun dengan memanfaatkan skala sikap berdasarkan skala Likert. Hal ini memungkinkan hasil jawaban dari para responden memiliki skala interval yang dapat dianalisis secara statistik. Dalam analisis statistik deskriptif penelitian ini, langkah-langkahnya melibatkan perhitungan skor aktual untuk setiap kriteria, yang kemudian dibandingkan dengan skor ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Terhadap Mahasiswa

Evaluasi yang dilakukan terhadap mahasiswa dibagi menjadi 4 aspek yang meliputi: 1) tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran; 2) relevansi pelaksanaan program dengan kebutuhan mahasiswa; 3) pengembangan pengetahuan dan keterampilan; dan 4) persepsi kepuasan mahasiswa. Pada aspek pertama (tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran), pertanyaan yang diajukan adalah: Seberapa baik Anda memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh praktisi dan dosen pendamping selama mengikuti kuliah di kelas kolaboratif? (yang diukur dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi Pelajaran). Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 58,9% menjawab paham, 22,2% menjawab netral, 16,3% menjawab sangat paham, 2,4% menjawab kurang paham, dan 0,2% menjawab tidak paham.

Pada aspek kedua (relevansi pelaksanaan program dengan kebutuhan mahasiswa), pertanyaan yang diajukan adalah: Apakah materi pembelajaran yang disampaikan oleh praktisi dan dosen pendamping relevan dengan kebutuhan Anda dalam perkuliahan? Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 58,62% menjawab setuju, 21,16% menjawab sangat setuju, 18,85% menjawab netral, 1,14% menjawab tidak setuju, dan 0,24% menjawab sangat tidak setuju. Sedangkan pada aspek ketiga (pengembangan pengetahuan dan keterampilan),

terdapat 2 pernyataan yang diajukan yaitu: pertama, saya mengetahui aplikasi di lapangan/tempat kerja dari teori/ilmu yang saya pelajari selama ini. Dan kedua, kompetensi saya meningkat melalui tugas-tugas dan studi kasus yang diberikan oleh dosen dan praktisi. Berdasarkan hasil survei, pada pernyataan pertama didapatkan 54,71% menjawab setuju, 33,80% menjawab sangat setuju, 11,16% menjawab netral, 0,18% menjawab tidak setuju, dan 0,15% menjawab sangat tidak setuju. Di sisi lain, pada pernyataan kedua diketahui bahwa 53,52% menjawab setuju, 23,8% menjawab sangat setuju, 21,19% menjawab netral, 1,31% menjawab tidak setuju, dan 0,17% menjawab sangat tidak setuju.

Di sisi lain, untuk aspek keempat (persepsi kepuasan mahasiswa), terdapat 2 pertanyaan yang diajukan: pertama, seberapa puaskah Anda dengan keseluruhan pelaksanaan mata kuliah kelas kolaboratif dalam program PM? Dan kedua, seberapa puaskah Anda dengan praktisi yang mengajar Anda dalam mata kuliah yang Anda jalankan? Berdasarkan temuan survei, pertanyaan pertama menunjukkan bahwa 40,3% menjawab puas, 37,8% menjawab netral, 21,1% menjawab sangat puas, 0,5% menjawab tidak puas, dan 0,3% menjawab sangat tidak puas. Di sisi lain, pada pertanyaan kedua ditemukan bahwa 38,8% menjawab netral, 38,2% menjawab puas, 22,7% menjawab sangat puas, 0,8% menjawab kurang puas, dan 0,3% menjawab sangat tidak puas.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa yang meliputi 4 aspek yang diukur diatas, yaitu: 1) tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran; 2) relevansi pelaksanaan program dengan kebutuhan mahasiswa; 3) pengembangan pengetahuan dan keterampilan; dan 4) persepsi kepuasan mahasiswa, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program PM dari sisi mahasiswa secara umum sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran cukup baik, karena yang masuk dalam kategori kurang paham dan sangat tidak paham sangat sedikit (2,6%), sedangkan yang masuk dalam kategori paham dan sangat paham cukup dominan (75,2%). Selanjutnya dari segi relevansi pelaksanaan program dengan kebutuhan mahasiswa terbilang cukup baik karena jumlah yang menjawab setuju dan sangat setuju cukup mendominasi (hampir 80%), sedangkan yang menjawab netral tidak terlalu besar (18,85%).

Selanjutnya, aspek mendapatkan pengetahuan dan keahlian cukup positif. Persentase mahasiswa yang menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa program PPL telah membuat mereka mengetahui penerapan teori/ilmu yang dipelajari selama ini di lapangan/tempat kerja sangat tinggi (88,5%). Se-

mentara itu, mayoritas mahasiswa (77,32%) menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa program PPL meningkatkan kompetensi mereka melalui tugas-tugas dan studi kasus yang diberikan oleh dosen dan praktisi. Dalam hal kepuasan mahasiswa, secara umum mahasiswa merasa puas dengan keseluruhan pelaksanaan mata kuliah kelas kolaboratif dalam program PM (78,1%) dan dengan praktisi yang mengajar mereka dalam mata kuliah tersebut (60,9%).

Namun mahasiswa yang menjawab netral terhadap kepuasan terhadap pelaksanaan mata kuliah kelas kolaborasi secara keseluruhan dalam program PM masih cukup tinggi, yaitu 37,8%. Selain itu, mereka yang menjawab netral terhadap praktisi yang mengajar mereka lebih tinggi lagi, yaitu 38,8%. Setelah digali lebih dalam dengan pertanyaan terbuka, sebagian besar mahasiswa menjawab karena materi yang disampaikan praktisi kurang substantif, metode pembelajaran yang kurang menarik, dan mekanisme perkuliahan yang masih menggunakan metode online. Temuan ini perlu menjadi catatan evaluasi tersendiri bagi tim program PM, maupun bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (secara umum) untuk dapat lebih meningkatkan kepuasan program bagi mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan pedagogi bagi praktisi, porsi andragogi yang lebih banyak lagi, dan memastikan pembelajaran dapat dilakukan secara luring.

Evaluasi Terhadap Praktisi

Evaluasi yang dilakukan terhadap praktikan dibagi menjadi 5 aspek yang meliputi: 1) dukungan dari atasan di lembaga/perusahaan; 2) proses pendaftaran dan kejelasan informasi; 3) materi pembekalan/pra-implementasi; 4) informasi pencairan honor bagi praktisi; dan 5) kepuasan praktisi. Pada aspek pertama (dukungan dari atasan di institusi/perusahaan), pertanyaan yang diajukan adalah: Seberapa besar atasan di institusi/perusahaan tempat Anda bekerja mendukung Anda untuk mengikuti program PM? Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 65,3% menjawab sangat mendukung, 27,4% menjawab mendukung, 6,8% menjawab netral, 0,3% menjawab tidak mendukung, dan 0,2% menjawab sangat tidak mendukung.

Pada komponen kedua (prosedur pendaftaran dan kejelasan informasi), ada dua pertanyaan yang diajukan: pertama, seberapa mudah Anda mendapatkan informasi yang Anda perlukan saat mendaftar di platform PM? Kedua, seberapa jelas informasi yang ada di platform PM mengenai status proses seleksi? Berdasarkan hasil survei, 54,4% menjawab mudah, 32,5% menjawab sangat mudah, 10,9% menjawab netral, 2,1% menjawab sulit, dan 0,1% menjawab sangat sulit. Di sisi lain, pada

pertanyaan kedua ditemukan bahwa 54,2% menjawab jelas, 28,7% menjawab sangat jelas, 10,3% menjawab netral, 6% menjawab kurang jelas, dan 0,8% menjawab sangat kurang jelas.

Sementara itu, pada aspek ketiga (materi pembekalan/pra-pelaksanaan), terdapat dua pertanyaan yang diajukan, yaitu: pertama, seberapa bermanfaat materi yang diberikan oleh tim program PM pada saat pembekalan/pra-pelaksanaan dalam menunjang kebutuhan Anda selama mengikuti program PM? Kedua, seberapa relevan materi yang Anda terima dari tim program PM selama sesi orientasi/pra-implementasi dalam memenuhi kebutuhan Anda selama mengikuti program PPL? Berdasarkan hasil survei, hasil dari pertanyaan pertama diketahui bahwa 54,8% menjawab bermanfaat, 35,8% menjawab sangat bermanfaat, 8,3% menjawab netral, 0,8% menjawab kurang bermanfaat, dan 0,3% menjawab sangat tidak bermanfaat. Sedangkan pada pertanyaan kedua diketahui bahwa 56,9% menjawab relevan, 33,5% menjawab sangat relevan, 8,6% menjawab netral, 0,7% menjawab kurang relevan, dan 0,3% menjawab sangat tidak relevan.

Mengenai aspek keempat (informasi mengenai pencairan honorarium bagi praktisi), diajukan pertanyaan sebagai berikut: Seberapa jelas informasi yang Anda terima dari tim program PM mengenai proses pencairan honorarium? Berdasarkan hasil survei, 43,1% menjawab jelas, 30,3% menjawab sangat jelas, 11,7% menjawab tidak jelas, 13,1% menjawab netral, dan 1,8% menjawab sangat tidak jelas. Di sisi lain, pada aspek kelima (persepsi kepuasan praktikan), pertanyaan yang diajukan adalah: seberapa puasakah Anda dengan pelaksanaan program PM secara keseluruhan? Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 48,5% menjawab puas, 39,3% menjawab sangat puas, 10,6% menjawab netral, 1,1% menjawab tidak puas, dan 0,5% menjawab sangat tidak puas.

Berdasarkan 5 aspek yang diukur dalam evaluasi praktisi: 1) dukungan dari institusi/perusahaan; 2) proses pendaftaran dan kejelasan informasi; 3) materi pembekalan/pra-pelaksanaan; 4) informasi pencairan honorarium praktikan; dan 5) persepsi kepuasan praktikan, dapat dianalisa bahwa evaluasi pelaksanaan program PM dari sisi praktisi secara umum juga cukup baik. Hal ini tercermin dari fitur dukungan yang sangat baik pada institusi/perusahaan tempat praktisi berasal, dimana jumlah yang mendukung dan sangat mendukung cukup tinggi (92,7%). Selain proses pendaftaran dan kejelasan informasi, sebagian besar praktikan (86,9%) percaya bahwa informasi yang diperlukan saat mendaftar di platform PM mudah (bahkan sangat mudah) untuk diakses/diperoleh. Selain itu, mayoritas praktisi (82,9%) percaya bahwa platform

PM mengkomunikasikan informasi dengan jelas mengenai perkembangan proses seleksi.

Sementara itu, bagian materi sesi orientasi/pra-implementasi dinilai baik. Hal ini dikarenakan mayoritas praktikan (90,6%) percaya bahwa materi yang diberikan dari tim program PM pada saat onboarding/pra-implementasi dalam menunjang kebutuhan selama mengikuti program PM bermanfaat dan (bahkan) sangat bermanfaat. Lebih lanjut, mayoritas praktikan (90,4%) merasa materi yang diperoleh selama pertemuan onboarding/pra-implementasi dari tim program PM bermanfaat dan (bahkan) sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan praktikan selama mengikuti program PM. Berdasarkan hasil penelitian di atas, elemen kepuasan praktikan yang dirasakan juga cukup baik. Mayoritas praktikan (87,8%) merasa puas atau sangat puas dengan pelaksanaan program PPL secara keseluruhan.

Namun, masih ada catatan pada elemen informasi pembayaran honorarium praktikan. Meskipun mayoritas praktikan (73,4%) berpendapat bahwa informasi yang mereka terima dari tim Program PM mengenai proses pencairan honor sudah cukup jelas, namun sebanyak 248 praktikan (atau 13,5%) berpendapat bahwa informasi mengenai pencairan honor praktikan tidak jelas dan (bahkan) sangat tidak jelas. Angka ini masih bisa bertambah jika jumlah praktisi yang menjawab netral (13,1%) dimasukkan. Hal ini tentu saja harus menjadi catatan evaluasi untuk perbaikan ke depan (khususnya) bagi tim program PM, maupun bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (secara umum) untuk lebih mengedepankan transparansi dengan meningkatkan kejelasan informasi mengenai pencairan honorarium praktikan. Memperluas saluran distribusi informasi kepada para praktisi, seperti melalui saluran media sosial program PM dan Kementerian, dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan langsung melalui email, Whatsapp, atau SMS, sehingga tidak terbatas pada website/platform PM.

Evaluasi Terhadap Koordinator Perguruan Tinggi

Evaluasi terhadap koordinator perguruan tinggi dibagi menjadi lima aspek: 1) kejelasan informasi hak dan kewajiban Koordinator Perguruan Tinggi (PT); 2) penyesuaian kurikulum Kampus Merdeka; 3) dukungan dan kesiapan mengikuti program PM; 4) kemudahan akses informasi pendaftaran program PM; dan 5) kepuasan terhadap program PM. Pernyataan yang disampaikan pada aspek pertama (kejelasan informasi hak dan kewajiban koordinator perguruan tinggi): Seberapa jelas tim program PM/ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Tim memberikan informasi tentang hak dan kewajiban koor-

dinator perguruan tinggi? Berdasarkan hasil survei, 55% menjawab jelas, 20% menjawab sangat jelas, 15% menjawab netral, 8,64% menjawab tidak jelas, 1,36% menjawab sangat tidak jelas.

Ada dua pertanyaan yang diajukan pada elemen kedua (penyesuaian kurikulum Kampus Merdeka): pertama, apakah kampus Anda sudah menerapkan penyesuaian kurikulum dengan kebijakan Kampus Merdeka? Kedua, bagaimana kampus Anda menyikapi hak belajar mahasiswa selama tiga semester di luar program studi? Berdasarkan hasil survei, 49,1% menjawab sudah di seluruh program studi, 29,1% menjawab sudah di beberapa program studi, 16,8% menjawab belum menyesuaikan, dan 5% menjawab tidak tahu. Di sisi lain, pada pertanyaan kedua ditemukan bahwa 55,1% menjawab dapat diakomodasi dan mendukung capaian pembelajaran lulusan, 17,6% menjawab dapat diakomodasi namun tidak relevan dengan capaian pembelajaran program studi, 15,1% menjawab berpotensi menambah studi mahasiswa, 8,5% menjawab hanya beberapa sks saja yang dapat diakui, dan 3,7% menjawab tidak memungkinkan untuk diakomodasi karena tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

Sementara itu, pada aspek ketiga (dukungan dan kesiapan untuk mengikuti program PM), pernyataan yang diajukan adalah: Pimpinan Perguruan Tinggi/Yayasan saya memberikan dukungan kebijakan yang sangat besar untuk mengikuti program PM. Dari hasil survei terhadap pernyataan tersebut, didapatkan hasil 50% menjawab setuju, 34,55% menjawab sangat setuju, 12,73% menjawab netral, 1,36% menjawab tidak setuju, dan 1,36% menjawab sangat tidak setuju.

Mengenai komponen keempat (kemampuan informasi pendaftaran program PM), diajukan pertanyaan: seberapa mudah bagi Anda untuk mendapatkan informasi yang diperlukan saat mendaftar akun perguruan tinggi di platform PM? Berdasarkan hasil jajak pendapat, 54,5% menjawab mudah, 21,8% menjawab sangat mudah, 20,5% menjawab netral, 2,56% menjawab sulit, dan 0,64% menjawab sangat sulit. Di sisi lain, pada aspek kelima (kepuasan terhadap program PM), pertanyaan yang diajukan adalah: seberapa puas-kah Anda dengan pelaksanaan program PM secara keseluruhan? Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 54,1% menjawab puas, 26,8% menjawab netral, 15,9% menjawab sangat puas, 3% menjawab sangat tidak puas, dan 0,2% menjawab sangat tidak puas.

Berdasarkan evaluasi terhadap koordinator perguruan tinggi, ada lima aspek yang diukur yaitu: 1) kejelasan informasi hak dan kewajiban koordinator perguruan tinggi; 2) penyesuaian kurikulum Kampus Merdeka; 3) dukungan dan kesiapan mengikuti program PM; 4) aksesibilitas

informasi pendaftaran program PM; dan 5) kepuasan terhadap program PM. Meskipun pada beberapa aspek seperti: dukungan dan kesiapan mengikuti program PM, aksesibilitas informasi program PM, dan kepuasan terhadap program PM sudah cukup baik, namun dapat dianalisa bahwa evaluasi pelaksanaan program PM dari sisi koordinator perguruan tinggi belum sepenuhnya ideal.

Hal ini terlihat, misalnya, pada aspek kejelasan informasi mengenai hak dan kewajiban koordinator perguruan tinggi. Meskipun mayoritas koordinator perguruan tinggi (75%) menyatakan bahwa tim program Kemdikbudristek/Tim Program PM memberikan informasi terkait hak dan kewajiban koordinator perguruan tinggi dengan jelas dan sangat jelas, namun jumlah koordinator perguruan tinggi yang menyatakan tidak jelas dan sangat tidak jelas cukup tinggi, yaitu 22 orang (10%). Angka ini secara implisit berpotensi naik drastis dari 15% yang menyatakan netral. Persoalan ini, seperti halnya persoalan informasi pencairan biaya bagi praktisi yang telah dibahas di atas, dapat diatasi dengan memperluas saluran/distribusi informasi melalui berbagai platform media sosial, email, Whatsapp, bahkan SMS.

Selanjutnya, jumlah program studi yang telah melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka (baik secara keseluruhan maupun sebagian program studi) tidak terlalu dominan (78,2%). Di sisi lain, jumlah prodi yang belum berubah dan tidak tahu sama sekali terbilang cukup besar, yaitu 21,8%. Hal ini juga harus menjadi perhatian, terutama dari pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang tidak hanya harus melakukan sosialisasi kepada entitas Perguruan Tinggi dan Program Studi, tetapi juga gencar mengadvokasi dan mendampingi implementasi kurikulum Kampus Merdeka. Hal ini sangat penting agar seluruh entitas program studi memahami esensi kurikulum dalam kebijakan Kampus Merdeka dan dapat mengimplementasikan program-program Kampus Merdeka dengan lebih efektif.

Evaluasi Terhadap Dosen

Evaluasi terhadap dosen dibagi menjadi empat kategori: 1) kejelasan informasi mengenai hak dan kewajiban dosen; 2) relevansi kriteria praktisi dengan kebutuhan kelas kolaborasi; 3) kepuasan yang dirasakan terhadap praktisi yang tersedia dalam platform; dan 4) kepuasan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan program PM. Pada aspek pertama (kejelasan informasi hak dan kewajiban dosen), pernyataan yang diajukan: Tim program PM Kemdikbudristek memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban dosen. Berdasarkan hasil survei, didapatkan hasil bahwa 58,16% men-

jawab jelas, 26,03% menjawab sangat jelas, 11,31% menjawab netral, 3,1% menjawab tidak jelas, dan 1,4% menjawab sangat tidak jelas.

Pada aspek kedua (relevansi kriteria praktisi dengan pemenuhan kebutuhan kelas kolaboratif), terdapat 3 pernyataan yang diajukan: pertama, praktisi tidak berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Kedua, praktisi memiliki keterampilan/keahlian yang dapat diajarkan. Ketiga, praktisi memiliki motivasi yang kuat dengan menyediakan waktu untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hasil survei, pada pernyataan pertama didapatkan 45,14% menjawab setuju, 30,23% menjawab sangat setuju, 16,01% menjawab netral, 6,68% menjawab tidak setuju, dan 1,94% menjawab sangat tidak setuju. Sedangkan dari pernyataan kedua didapatkan 59,05% menjawab setuju, 37,61% menjawab sangat setuju, 2,8% menjawab netral, 0,39% menjawab tidak setuju, dan 0,16% menjawab sangat tidak setuju. Di sisi lain, dari pernyataan ketiga diketahui bahwa 41,88% menjawab setuju, 55,32% menjawab sangat setuju, 2,49% menjawab netral, 0,16% menjawab tidak setuju, dan 0,15% menjawab sangat tidak setuju.

Sementara itu, pernyataan yang diajukan pada aspek ketiga (kepuasan yang dirasakan terhadap Praktisi pada platform), pernyataan yang diajukan adalah: ketika mendaftar dan memilih praktisi di platform praktisi pendidik, pilihan praktisi yang tersedia di platform cukup bervariasi dan mengakomodasi kebutuhan saya. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 56,6% menjawab setuju, 22,7% menjawab sangat setuju, 16,9% menjawab netral, 3,04% menjawab tidak setuju, dan 0,76% menjawab sangat tidak setuju. Di sisi lain, pada aspek keempat (kepuasan yang dirasakan terhadap pelaksanaan program PM secara keseluruhan), pertanyaan yang diajukan adalah: seberapa puas-kah Anda dengan pelaksanaan program PM secara keseluruhan? Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 56,9% menjawab puas, 29,6% menjawab sangat puas, 11,6% menjawab netral, 1,42% menjawab tidak puas, dan 0,47% menjawab sangat tidak puas.

Berdasarkan evaluasi terhadap dosen yang berkolaborasi dengan praktisi yang meliputi 4 aspek yang diukur: 1) kejelasan informasi hak dan kewajiban dosen; 2) relevansi kriteria praktikan dengan kebutuhan kelas kolaborasi; 3) persepsi kepuasan terhadap praktikan di tempat PM; 4) persepsi kepuasan terhadap pelaksanaan program PM secara keseluruhan, dapat dianalisa bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program PM dari sudut pandang dosen secara umum juga sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan misalnya pada aspek kejelasan informasi mengenai hak dan kewajiban dosen, dimana mayoritas dosen (84,19%)

menyatakan bahwa pihak Kemendikbudristek/tim pelaksana program PM telah memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban dosen dengan jelas dan (bahkan sangat jelas).

Lebih lanjut, aspek kepuasan yang dirasakan oleh praktikan terhadap platform juga relatif baik. Hal ini tercermin dari mayoritas dosen yang menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pada saat melakukan pendaftaran dan pemilihan praktisi di platform PM, pilihan praktisi yang tersedia di platform cukup variatif dan mengakomodir kebutuhan mereka (dosen) mencapai 79,3%. Sementara itu, pada aspek kepuasan yang dirasakan terhadap pelaksanaan program PM secara keseluruhan juga cukup baik. Hanya 1,89% yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas, sedangkan jumlah dosen yang menyatakan puas dan sangat puas jauh lebih dominan (86,5%).

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan pada aspek relevansi kriteria praktikan dengan pemenuhan kebutuhan kelas kolaboratif. Meskipun hampir semua dosen (96,6%) menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa praktisi yang menjadi mitranya memiliki keterampilan/keahlian yang dapat diajarkan, 97,2% menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa praktisi yang menjadi mitranya memiliki motivasi yang kuat dengan menyediakan waktu untuk berkontribusi di bidang pendidikan, namun ketika dikonfirmasi bahwa praktisi yang menjadi mitranya bukan dosen yang ber-Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) hanya 75,37% yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Sisanya menyatakan netral (cenderung ragu-ragu) sebanyak 16,01% dan 8,62% dosen menyatakan tidak setuju dan (bahkan) sangat tidak setuju. Hal ini (dosen memiliki NIDN) secara praktis bertentangan dengan kriteria teknis program. Dalam hal ini, Kementerian (melalui tim program PM) harus lebih tegas di masa mendatang dalam mengidentifikasi dan memitigasi norma-norma mendasar yang harus diikuti dengan baik.

KESIMPULAN

Program Praktisi Mengajar (PM) yang juga merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah berjalan sejak tahun 2022. Penelitian ini (seperti yang telah disebutkan pada rumusan masalah di awal) bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan Kampus Merdeka dalam program PM pada tahun 2022, ditinjau dari 4 entitas utama yaitu: mahasiswa, praktisi, koordinator perguruan tinggi, dan dosen. Berdasarkan kajian yang mendalam yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil evaluasi kebijakan Kampus Merdeka pada program PM belum sepenuhnya optimal. Meskipun banyak capaian baik yang diraih seperti:

relevansi pelaksanaan program dengan kebutuhan mahasiswa, peningkatan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa, dukungan atasan yang sangat baik di lingkungan institusi/perusahaan asal praktikan, kebermanfaatan sesi orientasi/pra-implementasi bagi praktikan, dukungan dan kesiapan yang memadai dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan Yayasan bagi kampusnya untuk mengikuti program PM, dan tingkat kepuasan dosen yang tinggi terhadap platform pemilihan praktikan, namun ada juga beberapa temuan yang patut menjadi perhatian dan catatan untuk perbaikan di masa mendatang. Temuan tersebut antara lain: rendahnya tingkat kepuasan mahasiswa terhadap keseluruhan pelaksanaan kelas mata kuliah kolaboratif dan praktisi yang mengajar dalam program PM, kurangnya kejelasan informasi pencairan honor bagi praktisi, kurangnya kejelasan informasi hak dan kewajiban bagi koordinator perguruan tinggi, kurikulum kebijakan kampus yang belum selaras dengan kurikulum di Program Studi, dan masih ditemukan praktisi yang memiliki NIDN.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrhein, V., Trafimow, D., & Greenland, S. (2019). Inferential statistics as descriptive statistics: There is no replication crisis if we don't expect replication. *The American Statistician*, 73(sup1), 262–270.
- Anggraini, S., Palupi, A., Hadi, K., & Arsyad, A. T. (2022). Analisis Dampak Program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Mahasiswa Internal. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(2), 442660.
- Apoko, T. W., Hendriana, B., Umam, K., & Handayani, I. (2022). The Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy: Students' Awareness, Participation, and Its Impact. *Journal of Education Research and Evaluation*, 6(4).
- Bennett, S., Lockyer, L., & Agostinho, S. (2018). Towards sustainable technology-enhanced innovation in higher education: Advancing learning design by understanding and supporting teacher design practice. *British Journal of Educational Technology*, 49(6), 1014–1026.
- Budiarti, A., Cangara, H., & Wahid, U. (2022). Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Peserta Program Indonesian International Student Mobility Awards (Iisma) Di Rusia. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 21(1), 106–119.
- De Wit-de Vries, E., Dolfma, W. A., van der Windt, H. J., & Gerkema, M. P. (2019). Knowledge transfer in university–industry

- research partnerships: a review. *The Journal of Technology Transfer*, 44, 1236–1255.
- Directorate General of Higher Education. (2020). Guidebook of Learning Independent-Independent Campus. In *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
<http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Gravetter, F. J., & Forzano, L.-A. B. (2018). *Research methods for the behavioral sciences*. Cengage learning.
- Hazin, M., & Rahmawati, N. W. D. (2023). Implementation of Policy “Praktisi Mengajar” in Higher Education. *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)*, 5(1), 1–13.
- Indrawati, S. M., & Kuncoro, A. (2021). Improving competitiveness through vocational and higher education: Indonesia’s vision for human capital development in 2019–2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 29–59.
- Kaputa, V., Loučanová, E., & Tejerina-Gaite, F. A. (2022). Digital transformation in higher education institutions as a driver of social oriented innovations. *Social Innovation in Higher Education*, 61–85.
- Kustini, T. (2022). Student’s Enthusiasm In Learning Speaking And Listening Through Skill Sharing From “Praktisi Mengajar”(Case Study In Professional Listening And Speaking Subject). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 4, 518–524.
- Malik, R. S. (2018). Educational challenges in 21st century and sustainable development. *Journal of Sustainable Development Education and Research*, 2(1), 9–20.
- Ministry of Education, C. R. and T. (2022). *Teaching Practitioner Program Handbook* (1st ed.). Ministry of Education, Culture, Research, and Technology.
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48.
- Möttus, R., Wood, D., Condon, D. M., Back, M. D., Baumert, A., Costantini, G., Epskamp, S., Greiff, S., Johnson, W., & Lukaszewski, A. (2020). Descriptive, predictive and explanatory personality research: Different goals, different approaches, but a shared need to move beyond the Big Few traits. *European Journal of Personality*, 34(6), 1175–1201.
- Musyaffi, A. M., Gurendrawati, E., Purwohedi, U., Zakaria, A., Anwar, C., Widawati, Y., & Nugroho, A. S. (2022). Pengembangan literasi keuangan digital melalui program praktisi mengajar. *PERDULI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(02), 55–66.
- Pandey, P., & Pandey, M. M. (2021). *Research methodology tools and techniques*. Bridge Center.
- Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A., & Valverde, P. (2019). *Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development*.
- Puspitawati, L., Solihat, M., Prayoga, I., & Surya, A. (2023). Survey Tingkat Pengetahuan Serta Kesiapan Dosen dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 6(1), 66–75.
- Qorib, M., & Harfiani, R. (2021). Independent Campus Policy In The New Normal Era. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, 2(1), 13–20.
- Rahman, A., Mawar, M., Bariyah, O. N., & Setyaningrum, I. (2022). Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Praktisi Mengajar pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1248–1256.
- Rahman, A., Zebua, W. D. A., Satispi, E., & Kusuma, A. A. (2021). Policy Formulation in Integrating Vocational Education Graduates with the Labor Market in Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(3), 331–371. <https://doi.org/10.18196/jgp.123141>
- Riniati, W. O. (2022). Exploring 21st-Century Critical Skills Needed for Preparing New Students for Indonesian International Student Mobility Awards. *KnE Social Sciences*, 7–11.
- Sa’diyah, M., Nurhayati, I., Endri, E., Supriadi, D., & Afrianto, Y. (2022). *The implementation of independent learning independent campus: The new paradigm of education in Indonesia*.
- Salamah, U., Amini, S., & Navisa, F. D. (2023). *Independent Learning-Independent Campus: From the Perspective of Justice and Utilitarian Theories*.
- Sesmiarni, Z., & Ismail, F. (2022). Mengembangkan Kompetensi Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi Melalui Komunitas Praktisi. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 463–469.
- Setyobakti, M. H., Cahyaningati, R., & Ermawati, E. (2022). Model Pembelajaran Program Wirausaha Merdeka Terhadap Minat Wirausaha Mahasiswa. *Progress Conference*, 5(2), 306–311.

- Siedlecki, S. L. (2020). Understanding descriptive research designs and methods. *Clinical Nurse Specialist*, 34(1), 8–12.
- Suardi, S., & Nur, S. (2022). Strengthening Character In The Teaching Campus Program At The Jaya Negara Elementary School, City Of Makassar. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 28–37.
- Suranto, S., Sulistyanto, A., & Marimin, A. (2022). Program Magang Wirausaha Merdeka Meningkatkan Mental Berdaya Wirausaha Mahasiswa. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 530–535.
- Susanti, N., Ronando, E., Basyarach, N. A., Sulistyawati, D. H., & Widiasih, W. (2022). Analysis of the effect of the MBKM Internship Program and Certified Independent Study (MSIB) on university performance Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *Technium Soc. Sci. J.*, 27, 579.
- Wulan, E. P. S., Saragi, N., Galingging, I., & Ambarita, M. K. (2023). Dampak Mata Kuliah Modul Nusantara Terhadap Mahasiswa Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5959–5963.